BAB III

DESKRIPSI PENETAPAN ISBAT NIKAH NOMOR 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm DAN NOMOR 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp

A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm

1. Duduk Perkara

Pada tahun 2024 dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm tentang perkara mengenai isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang berkedudukan sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Adapun Pemohon I yaitu suami yang bernama XXXXXXXXXXXXX (nama disamarkan), tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 16 Oktober 2001 (umur 22 tahun), beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir. Kemudian Pemohon II yaitu istri bernama XXXXXXXXXXXXX (nama disamarkan), tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 28 Juni 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga. Keduanya bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX (alamat disamarkan).

Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam register perkara Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal ini para Pemohon pada tanggal 12 Juli 2022 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada penghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) dibayar tunai.

Pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus belum kawin (jejaka) dan Pemohon II berstatus belum kawin (perawan), serta para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau darah dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan. Dalam pernikahan tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan. Maka dalam hal ini, tujuan Pemohon

adalah sebagai alas hukum untuk memiliki buku nikah dan memenuhi memenuhi kepentingan administrasi hukum.

2. Urgensi Perkara

Berdasarkan telaahan terhadap penetapan isbat nikah yang diajukan berbentuk *volunteer* (permohonan) Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm maka penulis mendeskripsikan penetapan ini bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan pertimbangan yang berisikan alasan dan dasar hukum yaitu:

Perkara ini diajukan Pemohon karena perkara ini diperlukan untuk memiliki Buku Nikah dan memenuhi kepentingan administrasi hukum yang harus melalui penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Oleh karena itu, adanya kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan, hal demikian sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

3. Analisis Pembuktian

Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki kewenangan dalam perkara ini karena berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Pengantar Nikah No. 10/PKM/BS/III/2024 yang telah diberi materai cukup, dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan itu masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin

Perkara yang diajukan adalah perkara permohonan isbat nikah berdasarkan alat bukti P.3 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan atau siri yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 di wilayah hukum Kecamatan Banjarmasin Selatan, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Banjarmasin Selatan (KUA) yang merupakan wilayah hukum KUA tersebut.

4. Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Ditemukannya fakta hukum berdasarkan pemeriksaan di muka sidang yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi. Sehingga dinyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti telah dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam mempertimbangkan perkara ini maka perlu mengetengahkan dalil syar’i yaitu Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Kemudian diperkuat dengan menambahkan dalil yang juga termuat dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 dikatakan sebagai berikut:

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu sesuai dengan dakwaannya maka tetaplah pernikahannya tersebut”.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, sehingga terkait perkara ini memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, karena demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

5. Biaya Perkara

Seluruh biaya perkara dalam permohonan isbat nikah ini dibebankan kepada para Pemohon dengan biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim juga mengingatkan bahwa segala yang berkaitan dalam perkara ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan.

B. Gambaran Umum Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp

1. Duduk Perkara

Pada tahun 2024 dalam perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp tentang perkara mengenai isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang berkedudukan sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Adapun Pemohon I yaitu suami yang bernama (inisial B), tempat tanggal lahir di Atambua, 28 September 1989, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan PT. New Hope Indonesia. Kemudian Pemohon II yaitu istri bernama (Inisial S), tempat tanggal lahir di Kelampaian Ilir, 07 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga. Keduanya bertempat tinggal di Jalan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari RT. 001 Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 08 Maret 2024. Dalam hal ini para Pemohon pada tanggal 19 Februari 2024 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, dengan dinikahkan oleh penghulu sebagai wakil wali nikah dari saudara kandung Pemohon II karena pada saat menikah ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 05/472.12SKK/PD-KI/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024. Disaksikan oleh dua

orang saksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu) dibayar tunai.

Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 333/AC/2015/PA.Mtp tertanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura. Para Pemohon saat menikah tidak ada hubungan mahram atau darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pernikahan tersebut, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai keturunan (Pemohon II dalam keadaan hamil jalan 6 bulan). Selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah bercerai, dan Pemohon II tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II. Maka dalam hal ini, tujuan para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah adalah sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan dengan adanya memiliki buku nikah yang akan digunakan untuk administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga dan pendaftaran BPJS.

2. Urgensi Perkara

Berdasarkan telaahan terhadap penetapan isbat nikah yang diajukan berbentuk *volunteer* (permohonan) Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp maka penulis mendeskripsikan penetapan ini bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp menolak permohonan isbat nikah berdasarkan pertimbangan yang berisikan alasan dan dasar hukum yaitu:

Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut dalam perkara ini karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan di antara jenisnya adalah pengesahan nikah, berdasarkan yang termuat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang

merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai dasar dan akibat hukum dari adanya pernikahan tersebut.

Setelah mengajukan permohonan isbat nikah maka mengumumkan permohonan isbat nikah ini selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006.

3. Analisis Pembuktian

Adanya bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan, karena bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Semua bukti surat yaitu fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

Bukti P.1 sampai dengan P.5 (kecuali bukti P.3 Surat Keterangan Pernikahan) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Adapun bukti P.3 yaitu surat lain yang bukan akta. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Terbuktinya Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Banjar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura dan yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar berdasarkan bukti P.3 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor 02/SKP/PD-KI/III2024 dikeluarkan oleh Pambakal Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar pada tanggal 08 Maret 2024 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dan dihubungkan dengan bukti P.4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 087/KUA.17.03.02/PW.01/03/2024 dari KUA Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada tanggal 06 Maret 2024 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak.

Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami terdahulunya yang bernama Suriansyah pada tahun 2015 dan oleh karenanya Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan suami terdahulu pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berdasarkan bukti P.5 yaitu Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II.

Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2022 berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti P.3, maka tidak perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-

hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim mencukupkan pada bukti P.3 serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagai dasar untuk memutus perkara ini.

4. Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Isbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut. Namun Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang isbat nikah setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Penjelasan dari pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial, dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan undang-undang tersebut bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam.

Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan atau siri yang pada saat tersebut akses untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama sudah begitu mudahnya dan sama sekali tidak terbukti adanya halangan untuk Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara resmi namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II lebih memilih menikah di bawah tangan atau sirri, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata dengan sengaja menikah tanpa tercatat, perbuatan

mana tidak dapat dibenarkan, maka alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum.

Jika dipandang dari fungsi putusan pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui isbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang.

Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas. Meskipun demikian, Majelis Hakim mengaitkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Fakta hukum yang dihubungkan dengan adanya itikad baik Pemohon I dan Pemohon II untuk membina rumah tangga serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, di samping itu, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Maka kasus ini bertentangan dengan rasa keadilan, di mana pada masyarakat telah banyak melanggar hukum pernikahan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam. Dalam hal ini kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan

perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhan* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam *taqnîn al-ahkam* (kodifikasi hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait.

Akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut menimbulkan adanya hak-hak, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka kelak, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari maqasid syariah, yaitu berupa *hifzh al-mal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri).

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan", kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Memandang secara *ex officio* permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak, akan tetapi tetap memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

5. Biaya Perkara

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Majelis Hakim juga mengingatkan bahwa segala yang berkaitan dalam perkara ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan.

Tabel 3. 1 Matriks Pertimbangan dan Dasar Hukum yang Digunakan Hakim

No.	Perkara	Pertimbangan	Dasar Hukum	Penetapan
1.	314/Pdt. P/2024/ PA.Bjm	<ul style="list-style-type: none"> - Terbuktinya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun. Serta terbukti tidak adanya halangan perkawinan. - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam. - Keterangan para saksi juga berpengaruh terhadap kuatnya bukti 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi syarat dan rukun dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. - Tidak ada halangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. 	Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 di wilayah Hukum Kantor

No.	Perkara	Pertimbangan	Dasar Hukum	Penetapan
		sahnya perkawinan mereka.	<p>- Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل</p> <p>"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".</p> <p>- Menambahkan dalil yang juga termuat dalam <i>Kitab Bughyatul Mustarsyidin</i> halaman 298 dikatakan: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu sesuai dengan dakwaannya maka tetaplh pernikahannya tersebut".</p>	<p>Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.</p>

No.	Perkara	Pertimbangan	Dasar Hukum	Penetapan
2.	95/Pdt. P/2024/ PA.Mtp	<p>- Tidak ada halangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara resmi namun lebih memilih menikah di bawah tangan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan alasan ketiadaan pencatatan pernikahan tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait sehingga bertentangan dengan hukum.</p> <p>- Fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (<i>tool of social engineering</i>), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkan melalui</p>	<p>- Isbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.</p> <p>- Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang isbat nikah setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut.</p> <p>- Menerapkan ketentuan tentang kemestian</p>	Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

No.	Perkara	Pertimbangan	Dasar Hukum	Penetapan
		<p>isbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan dipermainkan dan masyarakat akan mudah menikah di bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang.</p> <p>- Memandang secara <i>ex officio</i> permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak, akan tetapi tetap memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.</p>	<p>melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p> <p>- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”.</p>	